

TESIS

**EFEK MODERASI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI
INDONESIA**

***THE MODERATING EFFECT GOVERNMENT EXPENDITURE ON
ECONOMIC GROWTH TO POVERTY IN INDONESIA***

NUR AZIZAH IDRIS

A032222010



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

EFEK MODERASI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

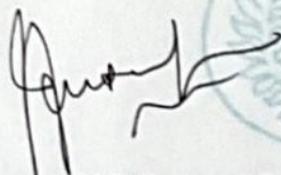
NUR AZIZAH IDRIS
A032222010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 29 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

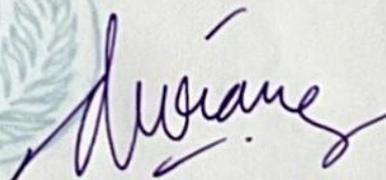
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



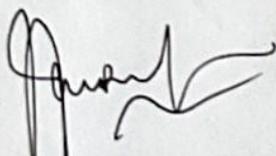
Dr. Indraswati Tri Abdireviane, S.E., MA.CWM®
NIP. 196510121999032001



Dr. Nur Dwiana Sari Saudl, S.E., M.Si.CWM®
NIP. 197701192008012008

Ketua Program Studi
Magister Sains Manajemen

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Indraswati Tri Abdireviane, S.E., MA.CWM®
NIP. 197412062000121001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.,CIPM
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Azizah Idris

NIM : A032222010

Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

EFEK MODERASI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis ter kutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan



Nur Azizah Idris

PRAKATA

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah senantiasa memberi nikmat baik Kesehatan maupun keselamatan atas izin-Nya penulis mampu dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Efek Moderasi Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Shalawat serta salam tak lupa kita kirikan kepada Nabi Muhammad SAW., semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam tulisan ini serta dalam proses penyusunan tesis ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dalam waktu yang tepat. Oleh karena itu, peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, S.E., MA. CWM® sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan sekaligus pembimbing I & Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. CWM® selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E., MA. CRP, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., MA. CWM, dan Bapak Dr. Abd. Rahman Razak,

S.E.,MS. Sebagai tim penguji yang telah memberikan saran dan arahan dalam melengkapi tesis ini.

5. Orang tua penulis yaitu Dra. Hj. Wakiah HM, M.Si dan Alm. Drs. H. Idris Rahim yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Saudara penulis yaitu Riskiana, Munawir Syarif, Khaerul Umam, dan Mauliani Syita yang juga tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan di kelas Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan 2022-2 atas dukungan dan kebersamaannya.
8. Untuk seluruh teman-teman diluar lingkungan kampus yang banyak membantu dalam hal apapun itu hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika selama proses penulisan terdapat sikap ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati.

Makassar, 26 Agustus 2024



Nur Azizah Idris

ABSTRAK

NUR AZIZAH IDRIS. *Efek Moderasi Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia* (dibimbing oleh Indraswati Tri Abdi Reviane dan Nur Dwiana Sari Saudi).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh moderasi pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel. Pengumpulan data diperoleh dari data tahunan dan data per provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemiskinan, variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, dan variabel moderasi yaitu pengeluaran pemerintah. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah fungsi Pendidikan tidak mampu memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah fungsi Kesehatan mampu memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci : kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah

ABSTRACT

NUR AZIZAH IDRIS. The Moderating Effect Government Expenditure on Economic Growth to Poverty in Indonesia (supervised by Indraswati Tri Abdi Reviane and Nur Dwiana Sari Saudi).

This study aims to test and analyze the effect of government expenditure moderation on economic growth towards poverty in Indonesia. The data used are secondary in the form of panel data. Data collection was obtained from annual data and data per province in Indonesia obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance. The dependent variable in this study is poverty, the independent variable is economic growth, and the moderation variable is government expenditure. The analysis method used is the multiple regression analysis method. The results of this study indicate that economic growth affects poverty, government expenditure on the Education function is unable to strengthen the effect of economic growth on poverty, government expenditure on the Health function can enhance the impact of economic growth on poverty, and government expenditure on the economic function is unable to moderate the effect of economic growth on poverty in Indonesia.

Keywords: poverty, economic growth, government expenditure

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teoritis.....	11
2.2 Studi Empiris	25
2.3 Hubungan antar Variabel	28
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	33
3.1 Kerangka Konseptual	33
3.2 Hipotesis	35
BAB IV METODE PENELITIAN	36
4.1 Rancangan Penelitian	36

4.2 Jenis dan Sumber Data	36
4.3 Teknik Pengumpulan Data	36
4.4 Metode Analisis Data	37
4.5 Definisi Operasional	38
BAB V PEMBAHASAN	40
5.1 Perkembangan Variabel Penelitian	40
5.2 Analisis Hasil Penelitian	44
5.3 Pembahasan	46
BAB VI PENUTUP	56
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	4
Gambar 1.2 Tren Jumlah Penduduk Miskin dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia tahun 2018-2022.....	7
Gambar 1.3 Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia tahun 2018-2022.....	8
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 5.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia	40
Gambar 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	42
Gambar 5.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia...	43
Gambar 5.4 Kerangka Hasil Penelitian.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Hasil Penelitian	44
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu Upaya peningkatan kesejahteraan dari semua segi kehidupan bangsa, mencakup Pembangunan manusia seutuhnya maupun infrastruktur ataupun sumber daya yang ada di Indonesia. Pertumbuhan dan Pembangunan adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan dalam ekonomi merupakan salah satu elemen tujuan utama bagi negara yang sedang berkembang. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, keadilan serta kualitas sumber daya termasuk sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Salah satu masalah utama dalam Pembangunan ekonomi yang dialami oleh seluruh negara adalah kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah perekonomian yang kompleks dan menjadi hal yang sangat serius. Kemiskinan merupakan persoalan yang mendasar dan menjadi perhatian serius dari pemerintah di setiap negara, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan atau bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berbahaya bagi setiap daerah, karena kemiskinan adalah masalah yang sering terjadi di suatu daerah dan pengentasannya membutuhkan sinergitas antara Masyarakat dan pemerintah.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara termasuk negara Indonesia dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan dari Pembangunan nasional yaitu untuk menurunkan angka penduduk miskin. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu target

kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan Pembangunan yang fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memajukan angka pertumbuhan ekonomi. Kemajuan perekonomian suatu bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha memacu Tingkat pertumbuhan ekonominya. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara Bersama-sama dan berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil Pembangunan dan untuk menentukan arah Pembangunan ke depan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengevaluasi kinerja ekonomi, terutama untuk menganalisis hasil-hasil Upaya suatu negara atau regional untuk mencapai Pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan memberikan pendapatan lebih bagi Masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi bisa dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Masyarakat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan Masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau

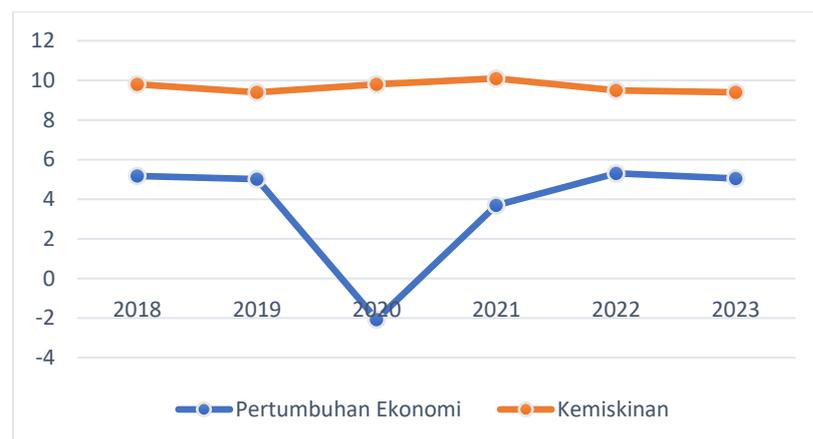
suatu daerah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Secara teoritis, Upaya pengentasan kemiskinan mensyaratkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan kebijakan perluasan kesempatan kerja dan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai indikator kesejahteraan, maka penting jika pertumbuhan ekonomi diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sebab peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya banyak tercipta lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, sehingga tingkat kemiskinan berkurang. Artinya, pertumbuhan ekonomi wajib diperhatikan di berbagai daerah.

Menurut neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Rendahnya tingkat kemiskinan menjadi suatu indikator penting dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan apabila dibarengi dengan pengurangan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Penurunan kemiskinan dapat lebih cepat jika penduduk miskin mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan.

Berdasarkan data dari WorldBank (2024), tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2023. Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,1 persen. Begitupun dengan

tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami fluktuasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,31 persen dan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,07 persen. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 9,8 persen di 2018 menjadi 9,4 persen pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun yang sama, tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan dari 5,17 persen menjadi 5,02 persen di tahun 2019. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 10,1 persen pada tahun 2021 dan tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Begitupun dengan tahun 2023, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,4 persen pada tahun 2023. Akan tetapi penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami penurunan dari 5,31 persen menjadi 5,05 persen di 2023. Hal ini tidak sesuai dengan teori *trickle down effect*.



Sumber : World Bank, 2024

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2018-2023

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan multidimensional dalam perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektifitas pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kewajiban bagi pemerintah. Komitmen dan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui capaian pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan yaitu melalui kebijakan pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang penting dalam mengurangi kemiskinan. Pengaruh pemerintah sangat penting dalam pembuatan keputusan atau kebijakan yang bersifat memihak warga kurang mampu. Dengan adanya campur tangan pemerintah, masyarakat kurang mampu dapat merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan yaitu adanya kebijakan pengeluaran pemerintah. Pemerintah mempunyai kesempatan untuk menangani masalah kerentanan tinggi yang dimiliki penduduk miskin dengan mengarahkan belanja pemerintah ke dalam sistem perlindungan sosial yang mampu mengurangi permasalahan tersebut. Dengan adanya pengeluaran pemerintah maka pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

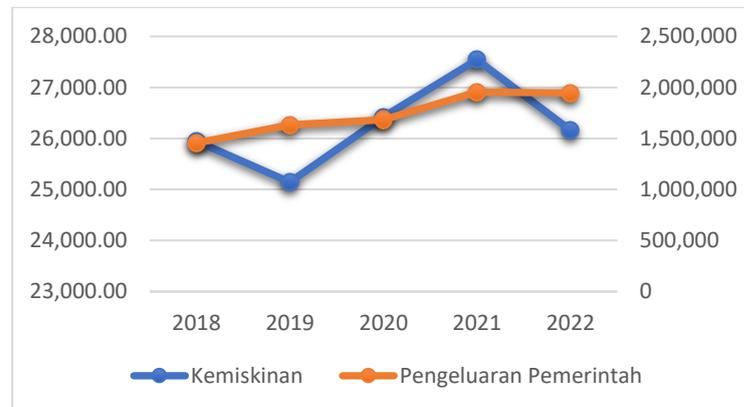
Pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan salah satu variabel dari Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor

pengeluaran konsumsi masyarakat (C), pengeluaran dari sektor investasi (I), dan pengeluaran sektor ekspor dan impor (X-M). Kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal melalui kebijakan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu variabel ekonomi yang dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Menurut Todaro, tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah satunya adalah tingkat pendapatan rata-rata daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar. Pengeluaran pemerintah tidak hanya melihat jumlahnya tetapi juga harus melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang nyata dengan mengeluarkan pengeluaran pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum pengeluaran pemerintah meningkat setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan data yang ada, data pengeluaran pemerintah tahun 2018-2021 selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan pengeluaran pemerintah tidak diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Berdasarkan pada grafik 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2021 terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah akan tetapi pada tahun tersebut juga jumlah penduduk miskin

mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengeluaran pemerintah tidak mampu mensejahterakan masyarakat.



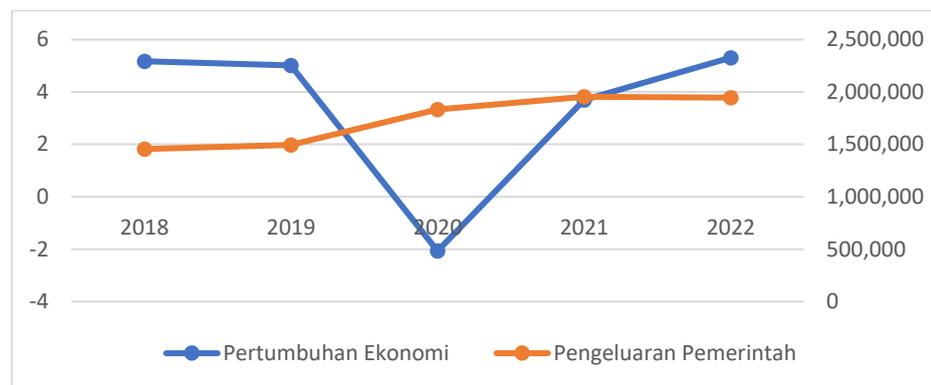
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.2 Tren Jumlah Penduduk Miskin dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia tahun 2018-2022

Selain itu, pengeluaran pemerintah juga memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari pengeluaran pemerintah yang juga tinggi. Hal ini sesuai dengan hukum wagner yang menyatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat. Ukuran tersebut dinyatakan dengan pendapatan perkapita masyarakat, yang diikuti oleh peningkatan pengeluaran pemerintah dalam hal menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan secara positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka peran

pemerintah dalam sektor ekonomi juga mengalami peningkatan. Pemerintah telah banyak melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran ini tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari tetapi juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan perekonomian. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus ikut berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.3 Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.3, pada tahun 2018-2019 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sedangkan pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2019-2020, peningkatan pengeluaran pemerintah tidak diikuti dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Setelah tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan dari angka -2,07 persen menjadi 3,70 persen pada tahun 2021 dan 5,31 persen pada tahun 2022. Sedangkan data pengeluaran pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2022 dari Rp 1.954.548,5 menjadi Rp 1.944.542,3. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022-2023, pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dari 1.944.542,3

menjadi Rp 2.230.025,1. Akan tetapi, peningkatan pengeluaran pemerintah ini tidak diikuti dengan peningkatann pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5,31 persen di tahun 2022 menjadi 5,05 persen di tahun 2023. Berdasarkan data diatas, hal ini tidak sesuai dengan hukum wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dan teori yang telah dijelaskan, maka penelitian ini hadir untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, serta bagaimana kebijakan pengeluaran pemerintah berperan sebagai variabel moderasi antara hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia ?
2. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi Pendidikan memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia ?
3. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia ?
4. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah sebagai pihak pengambilan kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan yang tepat.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai aplikasi dari teori-teori ekonomi yang digunakan sehingga dapat menambah referensi untuk mengetahui secara teoritis mengenai kemiskinan.
3. Bagi Masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah nasional yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia sebagai mana yang diungkapkan dalam teori kemiskinan dalam buku yang dikarang oleh Nurkse tahun 1953, yang mengemukakan bahwa kemiskinan yang tinggi terjadi karena jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga menyebabkan turunnya investasi masyarakat baik pada Pendidikan dan Kesehatan yang dapat menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya kualitas hidup menyebabkan produktivitas rendah dan kemiskinan tinggi. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang diterima di bawah minimum sehingga masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Rendahnya pendapatan dapat dipicu oleh rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selain itu proses penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang minim di Indonesia menyebabkan penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga kemiskinan menjadi tinggi.

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yaitu paradigma Neo Liberal dan paradigma Demokrasi sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang pertama yaitu Paradigma Neo-Liberal. Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi focus utama dalam

melihat kemiskinan. Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapus kemiskinan. Bagi pendekatan ini strategi penganggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun Lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Adapun paradigma yang kedua yaitu Paradigma Demokrasi Sosial. Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti Pendidikan, Kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disinilah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Peran negara dalam

pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional, misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun.

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata 'miskin' yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran.

World Bank mengartikan kemiskinan sebagai '*Poverty is to be hungry, to lack shelter and clothing, to be sick and not cared for, to be illiterate and not schooled.*' Kemiskinan berarti kelaparan, ketiadaan tempat tinggal dan pakaian, menjadi sakit dan tidak dirawat, buta huruf dan tidak sekolah. Dalam bentuk sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan. Bank Dunia menetapkan mereka yang disebut sebagai penduduk miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari \$5 per hari jika dikurs-kan dalam rupiah, rata-rata masyarakat yang masih memiliki pendapatan dalam kisaran Rp. 50.000, per hari. Jika standar ini ditetapkan di Indonesia maka jumlah penduduk miskin akan sangat banyak. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai standar tersendiri dalam menggolongkan kelompok miskin (Wahyuli, 2016).

Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan Kesehatan yang buruk, memiliki tingkat

Pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk, dan memperoleh penghasilan yang rendah. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni : tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, seberapa apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas.

Bentuk-bentuk kemiskinan menjadi beragam ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sudut pandang pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua antara lain kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan, dan Kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan perangkat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses pada Pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, Kesehatan, perumahan dan Pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan jenis ini mengacu pada satu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Pengukuran kemiskinan relatif didasarkan

pada perbandingan pendapatan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah terhadap kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi. Artinya sebenarnya kelompok tersebut tidak miskin secara absolut, tetapi lebih miskin dibandingkan kelompok masyarakat lain yang kaya atau makmur. Kemiskinan ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan nasional yang diterima antara lapisan sosial dalam masyarakat. Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan (Soedjatmoko, 1983).

Bentuk kemiskinan jika dilihat dari sisi penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang disekitarnya. Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu, seperti seseorang atau masyarakat yang merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok ini tidak mudah diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya. Dengan ukuran absolut mereka miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau dikatakan miskin.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dalam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa serta meningkatnya kemakmuran di suatu negara.

Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu tempat menunjukkan seberapa baik daerah tersebut telah dikembangkan. Tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan stabilitas keadaan ekonomi meningkat seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Semakin buruk keadaan perekonomian dan rendahnya tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, maka menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut juga rendah. Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu total produk dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah selama periode waktu tertentu. PDB digunakan untuk menghitung perekonomian suatu daerah. Selain itu, PDB juga merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi. PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada satu tahun atau satu periode serta pendapatan total yang diterima dari seluruh produksi barang dan jasa dalam suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan atau mengukur tercapainya perkembangan suatu perekonomian. Secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam perekonomian actual, pertumbuhan ekonomi berarti Pembangunan ekonomi yang terjadi secara fisik di suatu negara seperti adanya

peningkatan jumlah dan produksi barang-barang industri, peningkatan infrastruktur, fasilitas Pendidikan, peningkatan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada serta berbagai perkembangan lainnya. Suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh apabila seluruh pendapatan riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada suatu tahun tertentu lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik mulai berkembang sejak tahun 1950-an yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini dikenal dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Pandangan ini memiliki dasar pada aliran klasik, dimana perekonomian akan tetap mengalami *full employment* dan kapasitas modal tetap akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan demikian, perkembangan perekonomian akan tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Teori pertumbuhan neoklasik menggunakan fungsi produksi yang dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglass yang dikenal dengan sebutan fungsi produksi Cobb-Douglass. Fungsi produksi Cobb-Douglass menjelaskan hubungan antara pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi dalam memengaruhi Tingkat output. Apabila proses pertumbuhan ekonomi dalam kondisi teknologi yang konstan, maka Tingkat pertumbuhan akan dicapai tergantung pada Tingkat modal dan jumlah tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa faktor perkembangan teknologi sebagai faktor yang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Evsey Domar dan R.F. Harold yang dikenal dengan teori pertumbuhan Harold-Domar. Harold Domar membangun model pertumbuhan berdasarkan pada teori keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan oleh Keynes. Keynes menyatakan bahwa pembelanjaan agregat akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi Perusahaan. Dalam model Harrod-Domar, dua faktor tersebut sangat menentukan tingkat pendapatan nasional. Harrod Domar menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara ekonomi dan besarnya stok modal dan Tingkat pendapatan nasional, hal ini menandakan bahwa setiap tambahkn neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional. Asumsi lain dari model Harrod-Domar adalah agar pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin dari pendapatannya nasionalnya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat.

Teori pertumbuhan ekonomi Keynes memandang pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dapat dilihat melalui komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi Masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah serta ekspor dan impor. Selain itu, Keynes juga menyatakan bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

Teori pertumbuhan baru atau biasa dikenal dengan *New Growth Theory* dan disebut juga dengan teori pertumbuhan endogen. Teori ini dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas Jr. Teori pertumbuhan baru dikemukakan untuk mengkritik teori neoklasik dalam menjelaskan sumber-sumber

pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang. Teori ini menekankan pada peran inovasi, pengetahuan dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, pertumbuhan tidak hanya bergantung pada faktor-faktor eksternal tetapi juga dipengaruhi oleh usaha manusia dalam menciptakan inovasi baru. Model pertumbuhan ekonomi endogen ini muncul sebagai pendekatan neoklasikal yang dianggap belum menjelaskan salah satu variabel utama pertumbuhan ekonomi yaitu Tingkat perkembangan teknologi yang digolongkan sebagai variabel eksogen. Teori ini mencoba memasukkan proses teknologi secara endogenous sehingga diperoleh hasil output Perusahaan atau industri yang lebih baik.

Model pertumbuhan baru menyajikan sebuah kerangka teoritis yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan baru mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (endogenous) sistem ekonomi itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan teori pertumbuhan neoklasik yang menganggap bahwa pertumbuhan produk nasional bruto sebagai akibat dari keseimbangan jangka panjang. Salah satu faktor produksi yang dianggap bersifat endogen adalah teknologi, dimana teknologi akan semakin maju jika dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana teknologi merupakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, modal yang diperlukan dalam hal ini tidak hanya bersifat fisik tetap juga berkaitan dengan modal manusia (*human capital*).

Teori Schumpter menekankan pentingnya adanya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpter mengatakan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus

membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi yang dilakukan dapat melalui mengenalkan barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi produk atau barang, memperluas pasar, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru serta mengadakan perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan inovasi atau investasi baru.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendanai pelaksanaan fungsi maupun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya menjadi bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pemerintah antar daerah. Pengeluaran pemerintah juga dapat digunakan sebagai investasi pembangunan manusia dan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Peningkatan kapasitas pembangunan manusia dapat dilakukan melalui investasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah yang nantinya akan memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat serta nantinya akan meningkatkan perekonomian regional.

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Pengeluaran pemerintah yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya

penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah adalah anggaran yang digunakan untuk pembelian faktor-faktor produksi (input) dan untuk pembelian produk (output).

Pengeluaran pemerintah merupakan gambaran kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah suatu negara dan merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah dalam pembangunan suatu negara yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Mankiw menyatakan bahwa dalam kebijakan pengeluaran pemerintah para pembuat kebijakan akan menitikberatkan alokasi pengeluaran untuk tiga jenis. Pertama, pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan dan perbaikan jalan/jembatan serta pembangunan infrastruktur lainnya. Kedua, bantuan anggaran untuk daerah. Ketiga, keperluan perlindungan sosial bagi masyarakat. Akan tetapi efektivitas pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran atau belanja yang diperuntukkan untuk kepentingan publik dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Pengeluaran pemerintah diutamakan untuk meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat sebagai pemenuhan wajib bagi suatu daerah melalui peningkatan

kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, pelayanan dasar serta jaminan sosial. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan program-program yang berkaitan dengan kawasan atau pedesaan yang terbelakang. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berperan untuk mengelola dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan angka kemiskinan. Pengeluaran pemerintah tidak hanya melihat jumlah anggarannya saja tetapi juga melihat bagaimana pemerintah mengelola pengeluaran pemerintah tersebut.

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber pandangan kaum Keynes yang menyatakan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Berdasarkan keseimbangan pendapatan nasional dapat dijelaskan bahwa peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional.

Berdasarkan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa peran pemerintah harus diminimalisir. Menurutnya, perekonomian akan mencapai keseimbangan jika tanpa adanya campur tangan pemerintah dan akan selalu mengalami peningkatan pesat. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes dengan teorinya yaitu ekonomi baru menyatakan bahwa perekonomian dituntut adanya intervensi pemerintah. Gagasan yang dibuat oleh Keynes menyatakan bahwa intervensi pemerintah ada untuk menjami pertumbuhan yang stabil dalam mengelola perekonomian baik

dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan dapat melalui tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar, sedangkan dari segi kebijakan fiskal dapat melalui perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu intervensi atau peran pemerintah yaitu dengan adanya aspek pengeluaran pemerintah yang menjadi bagian dari total pendapatan nasional dan sebagai kontrol kegiatan ekonomi.

Teori pengeluaran pemerintah menurut Rostow dan Mungrave menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan tahapan Pembangunan ekonomi. Pada tahap awal Pembangunan ekonomi, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyediakan berbagai saran dan prasarana yang mendukung Pembangunan. Pada tahap Pembangunan ekonomi menengah, investasi pemerintah masih diperlukan guna memacu pertumbuhan agar mampu lepas landas. Pada tahap ini, investasi swasta juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu pada tahap Pembangunan lanjut terjadi aktivitas transisi pemerintah dari penyediaan infrastruktur ekonomi hingga pengeluaran untuk layanan sosial seperti Kesehatan dan Pendidikan. Teori Rostow dan Mungrave merupakan pandangan-pandangan yang muncul dari pengamatan terhadap pengalaman Pembangunan ekonomi yang dialami oleh berbagai negara.

Klasifikasi belanja pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sembilan fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Kesembilan fungsi tersebut dikelompokkan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan

keuangan negara. Di antara beberapa fungsi tersebut, terdapat beberapa fungsi yang dapat mengelola anggaran pengeluaran pemerintah agar teralokasi dengan baik yaitu fungsi ekonomi, fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan. Fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dalam suatu wilayah. Untuk mendukung aspek tersebut dibutuhkan alokasi dana yang tepat yang telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintahan pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu daerah.

Belanja pemerintah fungsi pendidikan adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Belanja pemerintah fungsi pendidikan menjelaskan bahwa belanja pendidikan merupakan alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Penetapan alokasi belanja pemerintah fungsi Pendidikan dialokasikan minimal 20% dari anggaran APBD. Tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan teknologi, modal fisik manusia tidak dapat dimanfaatkan secara produktif. Pendidikan adalah salah satu investasi sumber daya manusia yang penting sehingga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pendidikan memberikan dampak terhadap produktivitas individu maupun nasional karena dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia.

Belanja pemerintah fungsi kesehatan merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Penggunaan anggaran belanja pemerintah bidang kesehatan juga dipergunakan untuk untuk meliputi pelayanan kesehatan perorangan, perbekalan kesehatan, keluarga berencana, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Bidang

kesehatan menjadi faktor utama yang hendak diwujudkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik.

Belanja pemerintah fungsi ekonomi merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah agar pembangunan daerah dapat terwujud. Belanja pemerintah bidang ekonomi dipergunakan untuk kedaulatan pangan dan energi nasional, efisiensi energi, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, dan lain-lain. Salah satu belanja pemerintah fungsi ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian yaitu belanja infrastruktur. Dengan adanya belanja infrastruktur yaitu dapat menyediakan ketersediaan infrastruktur yang akan melancarkan adanya mobilitas investasi dan perdagangan antar daerah. Selain itu, juga dapat mengatasi adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Kondisi pembangunan yang meningkat akan berdampak pada kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Studi Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Rahmawati (2021) mengenai Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, dan variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Imanto dkk (2020) mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Selatan. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel pengangguran dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas kedua variabel yang menunjukkan angka 0,019, yang artinya nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05.

Penelitian yang dilakukan oleh Wongkar, dkk (2023) mengenai Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel IPM, TPT, dan belanja pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penelitian yang dilakukan oleh Supratyoningasih dan Yuliarmi (2021) mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini yaitu investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Prov. Bali, investasi dan pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap Tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap Tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia, dkk (2020) mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur tahun 2010-

2019. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengaruh belanja pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur, 2) Variabel belanja langsung dan variabel belanja tidak langsung secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur tahun 2010-2019, 3) Pengaruh belanja pemerintah secara parsial terhadap pengentasan kemiskinan Kabupaten Lombok Timur, dan 4) Variabel belanja langsung dan variabel belanja tidak langsung secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur tahun 2010-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Elshahawany dan Elazhary (2023) mengenai pengeluaran pemerintah dan pengentasan kemiskinan regional dengan mengambil studi kasus di Egypt. Hasil dari penelitian ini yaitu belanja sosial pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan antar wilayah. Sedangkan pada Tingkat daerah, belanja pemerintah bidang Kesehatan, Pendidikan, dan sosial mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, terutama di wilayah Mesir Hulu dan Kairo.

Penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez (2018) mengenai Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Mexico. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan keseimbangan antara pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan dengan menggunakan model VECM menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan konsumsi per kapita sebesar 2,4 persen dan juga dapat mengurangi angka kemiskinan. Jika menggunakan uji kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Meksiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Chude, dkk (2019) mengenai Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Nigeria. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka Panjang, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya jika suatu negara meningkatkan pengeluaran pemerintah khususnya bidang Pendidikan, Kesehatan dan barang modal sebesar 1 persen maka Tingkat pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,70340 persen. Adapun hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pengentasan kemiskinan dalam jangka Panjang memiliki hubungan terbalik apabila pengeluaran tersebut berada pada sisi Pembangunan seperti fasilitas sosial, utilitas umum, infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam jangka Panjang maupun jangka pendek memiliki hubungan yang negatif, yang artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan di Nigeria.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan. Adapun tujuan penting dari pembangunan adalah berkurangnya tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilandasi oleh teori trickle down effect yang diperkenalkan oleh Arthur Lewis pada tahun 1954.

Teori trickle down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang

dampaknya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori ini mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh penduduk kaya terlebih dahulu dan selanjutnya akan dirasakan oleh penduduk miskin apabila penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang diterimanya. Oleh karena itu, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini juga menandakan bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang kecil jika penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi.

Upaya pengentasan kemiskinan mensyaratkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selain itu, rendahnya tingkat kemiskinan menjadi suatu indikator penting dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kemiskinan menandakan tingginya tingkat produktivitas pada masyarakat yang akan berdampak pada tingginya pendapatan yang akan diterima oleh masyarakat. Tingginya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan pada teori Solow, pertumbuhan ekonomi berfokus pada tingkat akumulasi modal, tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat kemajuan teknologi. Faktor ini dapat mempengaruhi tingkat upah dan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan modal lebih cepat daripada pertumbuhan

penduduk, maka masyarakat dapat mengalami peningkatan standar hidup dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

2.3.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Pengeluaran pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran atau belanja yang diperuntukkan untuk kepentingan publik dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.

Todaro menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok Masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik melalui pembayaran transfer dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi Pendidikan, subsidi Kesehatan, dan lain sebagainya. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan tergantung dari rencana yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Apabila porsi dana pengeluaran lebih besar untuk belanja barang dan jasa daripada belanja pegawai maka akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan dan perbaikan pendapatan Masyarakat yang akhirnya dapat menurunkan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teori Keynes. Teori Keynes

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan sisi permintaan (demand). Selain itu, Keynes menyatakan bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Oleh karena itu meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah ini juga hadir untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan serta program-program yang berkaitan dengan kawasan atau pedesaan yang tertinggal. Tujuan pengeluaran pemerintah diutamakan untuk meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat sebagai pemenuhan wajib bagi suatu daerah melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, pelayanan dasar serta jaminan sosial.

Pengeluaran pemerintah secara tidak langsung juga akan memberikan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat melalui pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan adanya pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan maka akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang nantinya akan berdampak terhadap produktivitas masyarakat. Tingginya tingkat produktivitas masyarakat maka menunjukkan tingginya tingkat pendapatan masyarakat. Tingginya pendapatan masyarakat menunjukkan kesejahteraan dalam masyarakat dan akan mengurangi kemiskinan. Selain itu, pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi dipergunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan terjadinya peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Adanya peningkatan infrastruktur maka akan meningkatkan mobilitas

masyarakat dan dapat meningkatkan daya saing UMKM yang nantinya akan berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang dialami oleh semua negara. Masalah kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi lainnya. Kemiskinan adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan Kesehatan yang buruk, memiliki tingkat Pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk, dan memperoleh penghasilan yang rendah. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni : tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Salah satu hal yang berperan penting untuk mengurangi kemiskinan yaitu dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori *trickle down effect*. Teori ini mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh penduduk kaya terlebih dahulu dan selanjutnya akan dirasakan oleh penduduk miskin apabila penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang diterimanya.

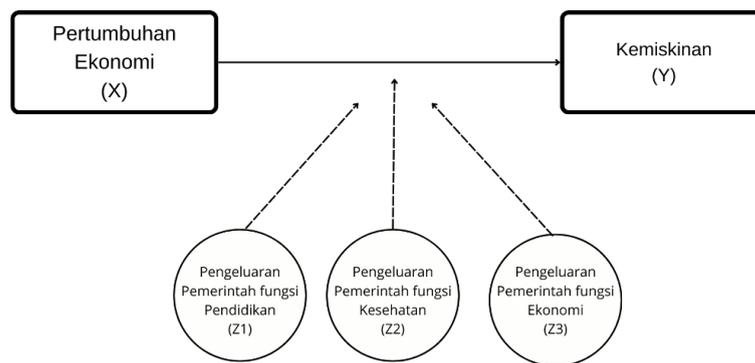
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga dapat menghasilkan output nasional yang semakin lama semakin besar. Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menunjukkan seberapa baik daerah tersebut telah dikembangkan. Pertumbuhan

ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan rendahnya kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tingkat produktivitas yang dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Tingkat produktivitas tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Tingginya tingkat pendapatan menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menandakan berkurangnya kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin jika diikuti dengan adanya variabel pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan dalam negeri yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Jadi dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konsep dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan teori yang relevan atau hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diduga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan diduga memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan diduga memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi diduga memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia.